

## Analisis Ketimpangan dalam Pembangunan Ekonomi Antarkota di Provinsi Aceh Tahun 2008-2017

Alfi Nadia<sup>1</sup>, Irwan Safwadi <sup>\*2</sup>, Idal Bahri<sup>2</sup>, Yuliana<sup>2</sup>

- 1) Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama, Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar
- 2) Dosen Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama, Jl. Blang Bintang Lama Km 8,5 Lampoh Keude Aceh Besar

\*Email Korespondensi: [irwan@abulyatama.ac.id](mailto:irwan@abulyatama.ac.id)

**Abstract:** *Economic development is a process of continuous change in the long term whose aim is not only to increase per capita income which is a monetary indicator, but also to improve the quality of life, literacy, welfare and prosperity. The data collection carried out in this study is in the form of secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of Aceh Province for the period 2008-2017. In this study using panel data and the data processing is carried out with the help of the eviews 9 program. The results of this study show that simultaneously or jointly the variables of the Human Development Index (IPM), Regional Original Income (PAD) and population have a significant effect on inequality in economic development. . While partially or one by one, the variable Human Development Index (HDI) has no influence but is significant on inequality in economic development. While the Regional Original Income (PAD) variable does not have a significant and significant effect on the inequality of economic development and the population variable has no and significant effect on the inequality of economic development.*

**Keywords :** *HDI, PAD, Population, Human Development Inequality*

**Abstrak:** Pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan secara terus-menerus dalam jangka panjang yang tujuannya tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang menjadi indikator moneter, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup, melek huruf, kesejahteraan dan kemakmuran. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh periode 2008-2017. Dalam penelitian ini menggunakan data panel dan pengolahan datanya dilakukan dengan bantuan program eviews 9. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan atau secara bersama-sama variable Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Sedangkan secara parsial atau satu per satu, variable Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak memiliki pengaruh dan tapi signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Sedangkan variable Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi dan variable jumlah

penduduk tidak berpengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi.

**Kata kunci : IPM, PAD, Jumlah Penduduk, Ketimpangan Pembangunan Manusia**

Melihat ketimpangan pembangunan antar wilayah dalam suatu negara atau daerah bukanlah hal yang mudah karena hal ini dapat menimbulkan debat yang berkepanjangan. Adakalanya masyarakat berpendapat bahwa ketimpangan daerah cukup tinggi setelah melihat banyak kelompok miskin pada daerah bersangkutan. Akan tetapi adapula masyarakat merasakan adanya ketimpangan yang cukup tinggi setelah melihat adanya segelintir kelompok kaya ditengah-tengah masyarakat yang umumnya masih miskin. Perlu diingat bahwa, berbeda dengan distribusi pendapatan yang melihat ketimpangan antar kelompok masyarakat, ketimpangan pembangunan antar wilayah melihat perbedaan antar wilayah. Hal ini, dipersonalkan disini bukan antar kelompok kaya dan kelompok miskin, tetapi adalah perbedaan antar daerah maju dan daerah terbelakang.

Dampak dari terjadinya ketimpangan ekonomi dapat berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan ekonomi yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga akan tercapai kesejahteraan. Dampak negatif dari ketimpangan ekonomi antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi akan sering dipandang tidak adil (Todaro, 2004). Dampak negatif ketimpangan inilah yang akan menjadi masalah pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri. PAD sendiri digunakan sebagai sumber APBD yang dapat meningkatkan ekonomi dan diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat ketimpangan. Menurut

Jumlah penduduk merupakan besarnya populasi di setiap daerah. Menurut teori klasik

semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin banyak tenaga kerja yang dapat dikerjakan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Semakin tinggi jumlah penduduk diharapkan mampu membangun kesejahteraan daerahnya (Sulistyo, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui ketimpangan pembangunan ekonomi antar Kota yang ada di provinsi Aceh, karena Kota di Provinsi Aceh hanya ada lima Kota, dan pembangunannya lebih sering terlihat spesifik terjadi di Kota-kota dan lebih mudah untuk melihat tingkat ketimpangannya. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan dalam pembangunan ekonomi antarkota di provinsi Aceh 2008-2017”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Ketimpangan Pembangunan**

Ketimpangan pembangunan atau disparitas adalah perbedaan pembangunan antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan. Ketimpangan pembangunan antar daerah satu dengan daerah lain merupakan suatu hal yang wajar, karena adanya perbedaan sumber daya dan awal pelaksanaan pembangunan antar daerah (Sjafrizal, 2008).

### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (Biro Pusat Statistik dan UNDP, 1997).

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 7 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

---

undangan". Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah "Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah".

### **Pengertian Penduduk**

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama kurang lebih enam bulan dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh, khususnya dilima kota yaitu : Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa, dan juga Subulussalam. Pertimbangan penelitian yang dilakukan antar kota di Provinsi Aceh adalah untuk mengetahui ketimpangan pembangunan ekonomi antar kota yang ada di Provinsi Aceh.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dari periode 2008-2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini menggunakan data panel, yang artinya adalah gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtun waktu (*time series*). Sebagai hasilnya data set panel akan berisikan informasi observasi setiap individual data dan sampel. Data panel dapat berguna bagi peneliti untuk melihat dampak ekonomis yang tidak bisa didapatkan dari penggunaan data *cross section* dan data *time series* secara terpisah.

Mengingat data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series*, maka modelnya dituliskan dengan :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \mu_{it}$$

Keterangan :

i = Unit *cross section* (individual)

$t$  = Periode waktu

$Y_{it}$  = Indeks Williamson

$X_1$  = IPM Kota

$X_2$  = PAD Kota

$X_3$  = Jumlah Penduduk.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketimpangan Pembangunan Ekonomi

Ketimpangan pembangunan digunakan untuk menganalisis seberapa besar tingkat kesenjangan di Provinsi Aceh dengan menggunakan perhitungan Indeks Williamson (IW), nilai angka Indeks yang semakin kecil atau makin merata dan bila semakin jauh dari angka nol menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar. Berdasarkan hasil perhitungan ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Aceh dengan menggunakan Indeks Williamson (IW) diperoleh Indeks ketimpangan Pembangunan di Provinsi Aceh tahun 2008-2017 sebagai berikut :

**Tabel 1. Tingkat Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Aceh Tahun 2008-**

Tahun	Banda Aceh	Sabang	Langsa	Lhokseumawe	Subulussalam
2008	0.0014	0.009	0.002	0.007	0.0046
2009	0.0014	0.009	0.004	0.024	0.0042
2010	0.0014	0.008	0.018	0.007	0.0012
2011	0.0013	0.009	0.002	0.023	0.0017
2012	0.0011	0.004	0.007	0.021	0.0001
2013	0.001	0.020	0.002	0.114	1.111
2014	0.224	0.060	0.092	0.161	1.163
2015	0.232	0.021	0.095	0.073	0.037
2016	0.232	0.074	0.094	0.139	1.190
2017	0.178	0.021	0.092	0.061	0.050

Sumber : Perhitungan dengan Indeks Williamson (IW)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dari hasil perhitungan ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh menggunakan Indeks Williamson, dapat di ketahui bahwa pada tahun 2013, 2014 dan 2016 Kota Subulussalam termasuk kedalam ketimpangan tinggi, hal tersebut

dapat berarti bahwa pembangunan di Kota Subulussalam masih sangat tidak merata.

### Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian. Adapun data mengenai Indeks Pembangunan Manusia selama tahun 2008-2017 di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut :

Tahun	Banda Aceh	Sabang	Langsa	Lhokseumawe	Subulussalam
2008	99.03	98.78	98.75	98.82	96.5
2009	99.1	98.81	99.1	99.22	96.53
2010	99.16	98.99	99.2	99.62	96.54
2011	99.18	99.08	99.3	99.64	96.55
2012	99.25	99.09	99.31	65.99	96.55
2013	81.84	71.07	73.40	74.13	60.11
2014	82.22	71.50	73.81	74.44	60.39
2015	83.25	72.51	74.74	75.11	61.32
2016	83.73	73.36	75.41	75.78	62.18
2017	83.95	74.10	75.89	76.34	62.88

**Tabel 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh Tahun 2008-2017**

Sumber : BPS 2019

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Banda Aceh, Banda Aceh, Sabang, Langsa dan Subulussalam dari tahun 2008 sampai dengan 2017 mengalami naik dan turun secara fluktuatif. Hal tersebut tidak cukup kuat untuk mengangkat posisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh ke level yang diharapkan. Dengan demikian, kebijakan yang ada harus dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada.

### Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pemerintah daerah tidak dapat terpisahkan dari pemerintah pusat karena

keterkaitannya dengan prinsip kesatuan. Atas dasar tersebut, maka kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah maka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Adapun data mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2008-2017 di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut :

**Tabel 3 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2008-2017**

Tahun	Banda Aceh	Sabang	Langsa	Lhokseumawe	Subulussalam
2008	45.222.40	18.038.142	17.134.695	20.604.686	1.514.408
2009	45.612.382	13.947.858	24.441.900	25.010.318	3.272.988
2010	52.248.991	17.145.365	14.314.098	19.414.992	3.361.401
2011	57.000.000	17.088.926	22.759.419	28.006.275	8.581.757
2012	99.022.051	24.927.274	16.670.273	28.230.836	6.099.447
2013	101.400.000	19.877.877	57.587.027	38.350.391	8.130.998
2014	171.777.262	42.723.294	141.168.697	48.730.257	25.219.047
2015	167.087.668	51.541.736	110.346.992	48.458.013	35.618.771
2016	258.469.597	47.776.631	121.369.467	56.348.631	40.984.794
2017	240.438.164	48.885.685	124.092.509	69.702.918	55.296.797

Sumber : BPS 2019

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2008 sampai dengan 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh, Sabang dan Langsa mengalami naik dan turun secara fluktuatif. Sedangkan Kota Lhokseumawe dari tahun 2008 sampai 2010 mengalami penurunan dan kembali mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Dan Kota Subulussalam dari tahun 2008 sampai 2012 mengalami penurunan dan kembali mengalami peningkatan pada tahun berikutnya.

### **Perkembangan Jumlah Penduduk**

Dengan banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah dapat mencerminkan

pengalokasian anggaran dari Pemerintah Pusat kepada setiap daerah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah yang memiliki jumlah penduduk banyak dituntut untuk melakukan pengendalian internal yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Semakin besar ukuran pemerintahan semakin mudah untuk mendapatkan modal eksternal dalam jumlah yang lebih besar, sehingga para penanam modal tertarik untuk menanamkan modalnya kepada pemerintahan tersebut. Adapun data mengenai Jumlah Penduduk selama tahun 2008-2017 di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut :

**Tabel 4 Jumlah Penduduk di Provinsi Aceh Tahun 2008-2017**

Tahun	Banda Aceh	Sabang	Langsa	Lhokseumawe	Subulussalam
2008	217.918	29.221	140.267	158.760	64.256
2009	212.241	29.184	140.415	159.239	66.451
2010	223.446	30.653	148.945	171.163	67.446
2011	228.562	31.355	152.355	175.082	68.490
2012	238.784	31.782	154.722	178.561	70.707
2013	239.404	32.215	159.761	183.232	72.103
2014	249.499	32.739	162.814	187.455	73.708
2015	250.303	33.215	165.890	191.407	75.188
2016	254.904	33.622	168.820	195.186	77.084
2017	259.795	33.978	171.574	198.980	78.725

Sumber : BPS 2019

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kota Banda Aceh, Sabang, Langsa, Lhokseumawe dan Subulussalam dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan, jumlah penduduk yang semakin berkembang harus dapat ditekan karena akan mempengaruhi kegiatan perekonomian yang ada apabila jumlah penduduk tidak dapat di kendalikan.

### Statistik Deskriptif

Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk dan ketimpangan pembangunan

ekonomi, maka statistik deskriptif dalam penelitian ini yaitu minimum, maksimum, mean dan standar deviasi variabel penelitian adalah sebagai berikut :

**Tabel 5 Deskripsi Statistik**

	Ketimpangan ekonomi pembangunan	Indeks pembangunan manusia	PAD	Jumlah penduduk
Mean	0.114188	85.31100	54407079	135.4321
Maximum	1.190000	99.64000	258469597	259.7950
Minimum	0.000100	60.11000	1514408.	29.18400
Std. Dev.	0.273275	13.88634	58029157	75.90418
Observations	50	50	50	50

Sumber : Data Diolah, 2019

Berdasarkan tabel 5 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi pembangunan terendah yaitu 0.000100 dan nilai tertinggi 1.190000, hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya ketimpangan ekonomi pembangunan yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 0.000100 hingga 1.190000 dengan nilai *mean* 0.114188 dan standar deviasi 0.273275, jadi dapat diketahui bahwa ketimpangan ekonomi pembangunan terendah dan tertinggi terdapat pada Kota Subulussalam. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah yaitu 60.11000 dan nilai tertinggi 99.64000, hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 60.11000 hingga 99.64000 dengan nilai *mean* 85.31100 dan standar deviasi 13.88634, jadi dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah terdapat pada Kota Subulussalam dan tertinggi terdapat pada Kota Lhokseumawe. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah yaitu 1514408 dan nilai tertinggi 258469597, hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 1.514.408 hingga 258.469.597 dengan nilai *mean* 54.407.079 dan standar deviasi 58.029.157, jadi dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terendah terdapat pada Kota Subulussalam dan tertinggi terdapat pada Kota Banda Aceh. Sedangkan jumlah penduduk terendah yaitu 29.18400 dan nilai tertinggi 259.7950, hasil tersebut menunjukkan bahwa besarnya jumlah penduduk yang menjadi sampel penelitian

ini berkisar antara 29.18400 hingga 259.7950 dengan nilai *mean* 135.4321 dan standar deviasi 75.90418, jadi dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terendah terdapat pada Kota Sabang dan tertinggi terdapat pada Kota Banda Aceh.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Hasil perhitungan ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Aceh dengan menggunakan Indeks Williamson (IW) diperoleh bahwa pada tahun 2013, 2014 dan 2016 Kota Subulussalam termasuk kedalam ketimpangan tinggi, artinya pembangunan di Kota Subulussalam sangat tidak merata.
2. Secara simultan, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk berpengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi
3. Secara parsial, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak memiliki pengaruh dan tapi signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi. Sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi dan variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh dan signifikan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah dapat memprioritaskan perencanaan pembagunan bagi daerah yang relatif tertinggal dengan strategi penanggulangan kemiskinan. Selain itu, setiap

daerah sudah seharusnya meningkatkan sikap kompetitif dengan daerah lain supaya setiap daerah mampu bersaing dalam meningkatkan kemampuan daerahnya masing-masing dan dapat menjalin kerjasama yang baik

2. Bagi mahasiswa diharapkan untuk memperbanyak sensus yang digunakan agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih serta mengambil sampel selain Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Aceh
3. Bagi peneliti lainnya diharapkan variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi..

### Daftar pustaka

- Anugerah Sulisty, Rohman (2017). "*Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Kabupaten di Provinsi Yogyakarta 2012-2016*". Jurusan Ilmu Ekonomi. Universitas Islam Indonesia.
- Amri, Khairul (2017). "*Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan : Panel Data 8 Provinsi di Sumatera*". Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh
- Asih, Widi (2015). *Analisis Ketimpangan Dalam Pembangunan Ekonomi Antar Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2004-2013*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- BPS.(2012-2017).*Dalam Angka*. (Ribu Jiwa) Badan Pusat Statistik Aceh
- Marhamah, Siti (2016). "*Analisis Ketimpangan dan Perubahan Struktur Ekonomi Kawasan BASAJAN 2008-2013*" Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah.
- Nurita Noviana, Devi (2014). "*Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2003-2012*". Jurnal Ekonomika dan Bisnis/IESP Universitas Diponegoro.
- Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten\_Kota Provinsi Aceh 2013-2017.